

Majalah Digital Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur



ASPIRASI *kita*

Edisi 13

Monthly Report

Fraksi PKS DPRD JATIM

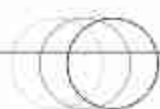
Jejak Pengabdian Fraksi PKS
DPRD Provinsi Jawa Timur

JANUARI 2026

Daftar Isi

Sampul Halaman.....	1
Daftar Isi	2
Profil Singkat Dewan.....	3
Ringkasan Kinerja Fraksi.....	4 - 16
Kiprah Dewan	17 - 40
Galeri Foto Kegiatan	41 - 48
Penutup	49

.....





PIMPINAN FRAKSI **PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

DPRD PROVINSI JAWA TIMUR 2025-2029

H. AGUS CAHYONO SHI, MHI.

DRS. H.M. KHUSNUL KHULUK

DR. H. PUGUH WILJI PAMUNGKAS, MM

KARISANDI SAVARI, S.PT., S.T

HJ. LILIK HENDARWATI

Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026



DPRD dan Pemprov Jawa Timur Sahkan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Senin, 19 Januari 2026

1. Pendapat Akhir Fraksi atas 2 (dua) Rancangan Perda Provinsi Jawa Timur;
2. Pengambilan Keputusan DPRD tentang Persetujuan atas 2 (dua) Rancangan Perda Provinsi Jawa Timur;
3. Pendapat Akhir Gubernur atas 2 (dua) Rancangan Perda Provinsi Jawa Timur; dan
4. Persetujuan Bersama antara DPRD dan Gubernur atas 2 (dua) Rancangan Perda Provinsi Jawa Timur.



Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026



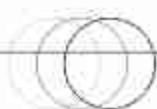
Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Jatim selama Januari 2025:



Kamis, 29 Januari 2026

1. Penetapan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jawa Timur tentang Kode Etik DPRD Provinsi Jawa Timur dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Timur; dan
2. Perubahan Susunan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Timur.



Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026



Agenda Komisi-Komisi

1. Komisi B

Optimalkan fungsi legislasi untuk kehutanan berkelanjutan. Monitoring kinerja dan Rencana kerja program kegiatan bidang kehutanan serta pelaksanaan perhutanan sosial. Selasa, 6 Januari 2026



2. Komisi E

Komisi E dukung peningkatan status RSUD Dr. Iskak Tulungagung menuju rumah sakit tipe A. Rabu, 7 Januari 2026.

3. Komisi B

Komisi B dorong sinergi pengembangan desa wisata dan tahura. Rapat koordinasi komisi B dan Pemkab Magetan terkait pengembangan dan pengelolaan desa wisata di Magetan. Jum'at 9 Januari 2026

4. Komisi E

Rakor Komisi E dalam rangka monitoring dan evaluasi program penurunan bullying terkait pembentukan TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) dan pembentukan tim khusus, sosialisasi anti kekerasan, pelatihan guru, serta integrasi nilai-nilai anti perundungan dalam kegiatan sekolah di Jawa Timur. 8 dan 9 Januari 2026



Agenda Komisi-Komisi



5. Komisi A

Komisi A DPRD Jawa Timur mendorong percepatan pembentukan BNN kabupaten sebagai bagian dari strategi P4GN (pencegahan dan pemberantasan narkoba). Jumat, 23 Januari 2026

6. Komisi E

Komisi E dorong penguatan peta kebencanaan di Jawa Timur.

7. Komisi B

Komisi B Jawa Timur dukung program swasembada gula nasional. penguatan produksi tebu untuk ketahanan pangan Indonesia.

8. Komisi A

Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur mengawal implementasi Perda Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang fasilitasi P4GN.



Agenda Badan - Badan



1. Banggar DPRD Jatim
Dorong implementasi DOD
(Desain Olahraga Daerah)
selaras DBON. Selasa 13
Januari 2026



2. Banggar

Banggar dalam strategi pajak dan mitigasi bencana dorong optimalisasi fiskal dan ketahanan bencana Jawa Timur. Rapat koordinatif banggar DPRD provinsi Jawa Timur dengan dinas ESDM provinsi D.I Yogyakarta dan BPBD provinsi D.I. Yogyakarta. 12-15 Januari 2026

3. Banggar

Banggar DPRD Jatim dorong penguatan program atlet berkelanjutan. Rabu, 14 Januari 2026

4. Bamus

Penguatan kebijakan internal DPRD Provinsi Jawa Timur
Selasa, 20 Januari 2026

5. Bamus

Dorong anggaran yang transparan dan menyentuh kebutuhan rakyat.
Rabu, 21 Januari 2026

6. Bamus

Bamus jadi motor, DPRD Jatim benahi regulasi reses
Senin- Kamis, 19-22 Januari 2025

7. Pansus

Pansus DPRD Jawa Timur melakukan rapat konsultasi ke Provinsi Jawa Tengah untuk mendalami praktik pengawasan dan pengelolaan kinerja BUMD yang berdampak langsung bagi perekonomian daerah. 27-28 Januari 2026.



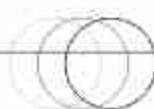
FRAKSI PKS DORONG PERDA BERKEADILAN UNTUK PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM



Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) yang berkeadilan dan berpihak nyata kepada pembudi daya ikan dan petambak garam. Sikap tersebut disampaikan dalam Pendapat Akhir Fraksi PKS terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, yang dibacakan Anggota Fraksi PKS, Khusnul Khuluk, pada Rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (19/1/2026).

Fraksi PKS menilai Raperda tersebut merupakan langkah strategis dan visioner untuk menjawab berbagai persoalan klasik yang selama ini dihadapi pelaku usaha perikanan budidaya dan pergaraman. Mulai dari fluktuasi harga, lemahnya posisi tawar, keterbatasan akses permodalan, hingga kerentanan terhadap perubahan iklim dan minimnya perlindungan sosial.

“Perda ini tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga menyangkut keadilan sosial, ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, serta penguatan kemandirian masyarakat pesisir dan perdesaan,” kata Khusnul Khuluk saat membacakan pendapat akhir Fraksi PKS.



Fraksi PKS menegaskan, meskipun Jawa Timur dikenal sebagai salah satu lumbung perikanan budidaya dan garam nasional, kontribusi besar tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan pembudi daya ikan dan petambak garam. Karena itu, kehadiran Perda ini dipandang penting sebagai instrumen perlindungan hukum sekaligus sarana pemberdayaan berkelanjutan.

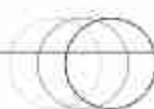
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PKS juga menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri. Salah satunya terkait penguatan partisipasi masyarakat dengan mengakomodasi ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2019. PKS berharap keterlibatan masyarakat, termasuk perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha, dapat diperluas untuk memperkuat ekosistem perikanan dan pergaraman.



Selain itu, Fraksi PKS mendorong penerapan sistem resi gudang sebagai instrumen untuk menjamin pemasaran hasil budidaya ikan dan garam, terutama di daerah sentra unggulan. Sistem ini diharapkan mampu memotong rantai distribusi yang merugikan petani dan meningkatkan kepastian harga. Terkait hilirisasi, Fraksi PKS menekankan agar pemerintah provinsi tidak hanya bergantung pada kesiapan BUMD. PKS mendorong terobosan melalui kerja sama dengan BUMN, asosiasi usaha, hingga pemerintah pusat agar hilirisasi perikanan budidaya dan pergaraman dapat dipercepat dan memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha.

Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan koperasi pembudi daya ikan dan petambak garam. Implementasi keanggotaan koperasi, menurut PKS, harus dilakukan secara bertahap, komprehensif, dan sukarela, dengan pemetaan koperasi yang matang agar tidak tumpang tindih. Tak kalah penting, Fraksi PKS menegaskan perlunya perlindungan sosial bagi pembudi daya ikan dan petambak garam, termasuk fasilitasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Mengingat tingginya tingkat kerentanan sosial di sektor ini, negara dinilai wajib hadir memberikan perlindungan yang memadai.

"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PKS menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur," katanya. "Dengan hadirnya Perda ini, Fraksi PKS berharap terwujud keadilan, perlindungan, dan keberdayaan bagi pembudi daya ikan dan petambak garam, sebagai bagian dari ikhtiar bersama membangun Jawa Timur yang maju, berdaulat, dan berkeadilan sosial," pungkas Khusnul Khuluk.



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)



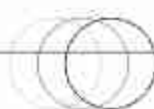


FRAKSI PKS JATIM
**SETUJUI PERUBAHAN PERDA
PENANGGULANGAN BENCANA,
TEKANKAN MITIGASI DAN
PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN**

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi PKS, Khusnul Khuluk, saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi dalam rapat paripurna, Senin (19/1/2026).

Dalam penyampaian, Khusnul Khuluk menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur beserta jajaran, serta Komisi E DPRD Jawa Timur, yang telah menuntaskan proses penyusunan dan pembahasan Raperda hingga tahap fasilitasi Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, perubahan Perda ini bukan sekadar memenuhi amanat yuridis, tetapi merupakan kebutuhan strategis dalam mendukung keberlangsungan pembangunan Jawa Timur yang tangguh terhadap bencana. "Raperda ini menjadi instrumen penting untuk memperkuat mitigasi dan penanggulangan bencana di Jawa Timur agar lebih presisi, optimal, dan integral, seiring meningkatnya kompleksitas ancaman bencana," ujar Khusnul.

Ia menekankan bahwa banyak bencana yang terjadi saat ini tidak semata-mata bencana alam, tetapi juga bencana ekologis akibat ulah manusia, sehingga perubahan perilaku dalam memperlakukan alam menjadi sangat penting. Fraksi PKS menilai perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2010 merupakan langkah strategis dan konstitusional, mengingat Jawa Timur termasuk provinsi dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, baik bencana geologis, hidrometeorologis, maupun non-alam. Oleh karena itu, regulasi yang adaptif, responsif, dan selaras dengan kebijakan nasional mutlak diperlukan. Khusnul Khuluk menegaskan bahwa Fraksi PKS mendorong agar penanggulangan bencana tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi lebih menitikberatkan pada pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta pemulihan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ia juga mengapresiasi penguatan peran BPBD serta pengarusutamaan isu kebencanaan dalam perencanaan pembangunan daerah.



"Penanggulangan bencana harus menjadi urusan lintas sektor yang membutuhkan koordinasi dan kolaborasi semua pihak," tegasnya. Dalam catatan akhirnya, Fraksi PKS menekankan pentingnya kolaborasi multistakeholder pentahelix yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat dan relawan, media, serta dunia usaha. Kolaborasi tersebut perlu disinkronkan secara jelas dalam berbagai pasal agar tidak tumpang tindih dan dapat berjalan berkelanjutan.

Selain itu, Fraksi PKS memberikan perhatian serius pada perlindungan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin. Khusnul menyatakan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan harus menjadi prinsip utama dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi hingga pemulihan pascabencana. Fraksi PKS juga mendukung penguatan peran relawan, pembentukan desa, pesantren, dan keluarga tangguh bencana, serta pelibatan lembaga pendidikan secara partisipatif dengan mendorong lahirnya pelajar dan remaja siaga bencana.

Menurut Khusnul, pendekatan ini penting agar edukasi kebencanaan dapat ditanamkan sejak dini kepada generasi muda, termasuk Gen Z dan Gen Alpha. Menutup Pendapat Akhir Fraksi, Khusnul Khuluk menegaskan bahwa persetujuan terhadap Perda ini harus diikuti dengan komitmen kuat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyiapkan regulasi turunan, penguatan kelembagaan, dukungan anggaran yang memadai, serta sistem pengawasan yang efektif. "Perda ini tidak boleh berhenti sebagai produk normatif, tetapi harus menjadi instrumen kebijakan yang benar-benar melindungi masyarakat dan memperkuat ketangguhan Jawa Timur dalam menghadapi bencana," pungkasnya.



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)



Reaksi PKS DPRD Jatim: Revisi Perda Peninggulangan Bencana jangan Cuma Jadi Produk Normatif

Penulis: Muhammad Izzatul Hameed
Editor: Dicky Karna

19 Jan 2026 07:07





SOROTI KASUS NENEK ELINA, LILIK DPRD JATIM: NEGARA TAK BOLEH DIAM SOAL HAK ATAS TANAH

Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil Surabaya yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, menanggapi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Agraria oleh Pemerintah Kota Surabaya menyusul polemik kasus sengketa tanah yang menimpa Nenek Elina. Ia menilai langkah tersebut sebagai sinyal positif kehadiran negara, namun menegaskan pentingnya pengawasan serius agar satgas tidak berhenti sebatas simbol kebijakan.

“Sebagai wakil rakyat tentu saya mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Surabaya yang membentuk Satgas Agraria sebagai respons atas kasus yang menimpa Nenek Elina. Ini menunjukkan adanya kepekaan negara terhadap jeritan masyarakat kecil yang selama ini sering kalah oleh sistem dan ketimpangan relasi kuasa,” ujar Lilik.

Kasus Nenek Elina sendiri mencuat ke ruang publik setelah seorang warga lanjut usia di Surabaya terlibat konflik agraria terkait tanah yang telah lama ia tempati. Polemik tersebut memantik empati luas masyarakat karena dinilai mencerminkan persoalan klasik agraria di perkotaan: lemahnya posisi warga kecil berhadapan dengan kekuatan modal, dokumen legal yang timpang, serta prosedur administratif yang tidak ramah kelompok rentan. Menurut Lilik, pembentukan Satgas Agraria harus menjadi momentum perbaikan tata kelola konflik agraria, bukan sekadar respons sesaat untuk meredam tekanan publik. “Apresiasi ini harus disertai kewaspadaan dan pengawasan yang serius. Satgas Agraria tidak boleh berhenti sebagai respons simbolik atau sekadar pemadam krisis. Yang jauh lebih penting adalah memastikan satgas ini bekerja dengan mandat yang jelas, keberpihakan yang tegas kepada masyarakat rentan, serta mekanisme kerja yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Lilik menilai ada sejumlah aspek krusial yang perlu dikaji dan diawasi bersama dalam kerja Satgas Agraria Surabaya.

Pertama, terkait kekuatan kewenangan satgas dalam menghentikan praktik penggusuran atau perampasan hak atas tanah yang tidak berkeadilan.

Kedua, soal keberpihakan kebijakan agar satgas tidak justru menjadi alat legalisasi konflik agraria yang merugikan warga.



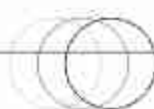
Selain itu, ia menekankan pentingnya akses masyarakat terhadap satgas. Menurutnya, Satgas Agraria harus mudah dijangkau, responsif, serta memberikan ruang aman bagi warga kecil untuk menyampaikan pengaduan tanpa rasa takut. "Koordinasi lintas level pemerintahan juga menjadi kunci, karena banyak persoalan agraria tidak hanya berhenti di level kota, tetapi melibatkan kewenangan provinsi hingga pusat. Sinergi ini mutlak diperlukan," tambahnya.

Lebih jauh, Lilik berharap kasus Nenek Elina tidak berhenti sebagai kisah pilu yang berlalu begitu saja, melainkan menjadi titik balik dalam pembenahan kebijakan agraria di Surabaya dan Jawa Timur secara umum. "Kasus Nenek Elina harus menjadi titik balik, bukan sekadar catatan pilu. Negara, dalam semua levelnya, wajib hadir bukan hanya sebagai penengah, tetapi sebagai pelindung hak-hak dasar warganya," pungkasnya. Sebagai legislator, Lilik memastikan akan terus mengawal dan mengkritisi secara konstruktif kinerja Satgas Agraria agar benar-benar menjadi instrumen keadilan bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas kebijakan.



Elina Widjajanti (pakaian hitam) didampingi Maria Sudarsini saat melihat rumahnya sudah rata dengan tanah.

| Sumber: www.bbc.com



Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menegaskan pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penyangga ekonomi daerah di tengah tantangan sektor industri, khususnya dampak penutupan dan perlambatan industri manufaktur yang berpotensi memicu meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK). Lilik menyampaikan, Komisi C DPRD Jatim terus mendorong penguatan BUMD agar mampu berinovasi dan berkreasi lebih jauh dalam menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Salah satu fokus utama penguatan tersebut adalah peningkatan kontribusi dividen bagi daerah sekaligus dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.

"Kami di Komisi C betul-betul mensupport BUMD agar memiliki inovasi dan kreativitas yang kuat. Salah satunya tentu kami dorong agar dividen BUMD semakin meningkat," ujar legislator PKS itu. Selain berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Lilik menekankan bahwa BUMD juga diharapkan berperan sebagai katalis dalam penciptaan lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja lokal yang terdampak perlambatan sektor manufaktur. Menurutnya, keberadaan BUMD harus mampu memberikan alternatif lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, sekaligus menjadi mitra penguatan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di lingkungan operasional perusahaan.

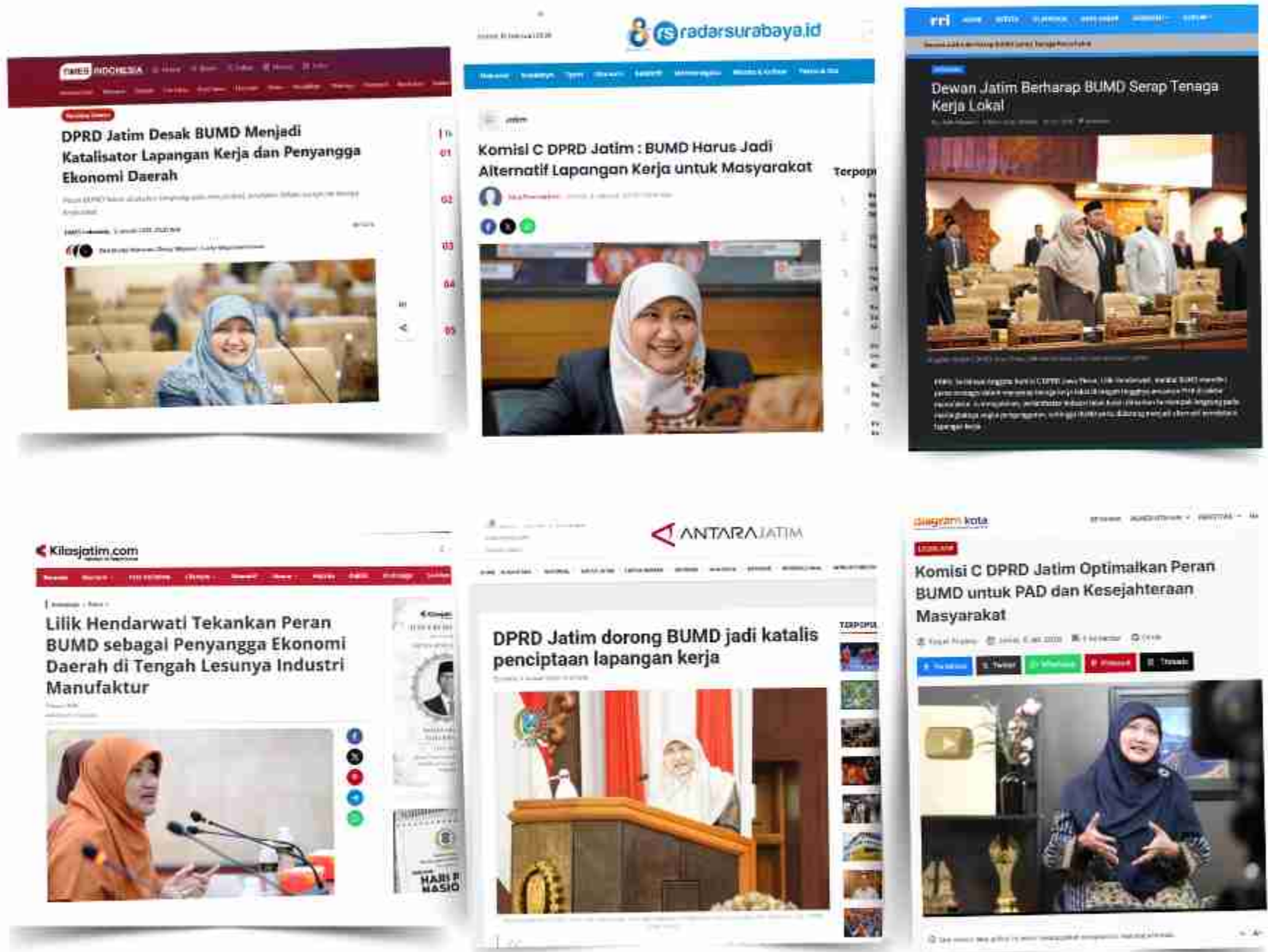
"Kami berharap BUMD bisa menjadi katalis, bukan hanya untuk penciptaan tenaga kerja lokal, tetapi juga memberikan dukungan nyata bagi UMKM di sekitarnya. Dengan begitu, ekosistem ekonomi daerah bisa tetap bergerak," jelas Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim tersebut. Lilik mengakui bahwa harapan besar terhadap BUMD ini perlu diiringi dengan komunikasi dan kerja ekstra, baik dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, termasuk dalam sinergi dengan BUMN. Upaya ini dinilai penting untuk menekan tingginya angka PHK di sektor industri lain.

"Kita masih berharap kesempatan-kesempatan kerja itu bisa diperluas melalui BUMD. Ini menjadi salah satu ikhtiar untuk mengurangi dampak PHK yang cukup tinggi di sektor manufaktur," tegasnya. Menutup pernyataannya, Lilik menegaskan optimisme DPRD Jatim terhadap kondisi ekonomi daerah hingga akhir 2025. Saat ini, DPRD Jatim juga tengah membentuk panitia khusus (pansus) guna memastikan seluruh BUMD di Jawa Timur dapat berjalan secara sehat, profesional, dan akuntabel. "Tidak hanya sektor di luar, BUMD kita sendiri harus benar-benar dipastikan berjalan dengan baik. Ini bagian dari ikhtiar menjaga stabilitas ekonomi Jawa Timur," pungkasnya.



**DORONG BUMD
JADI PENYANGGA
EKONOMI, LILIK
HENDARWATI
HARAP SERAP
TENAGA KERJA
LOKAL**

Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)





Dapil Malang Raya, Puguh Wiji Pamungkas. Selasa pagi (30/12/2025), Puguh hadir langsung dalam penyaluran bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik prasejahtera di Kabupaten Malang yang digelar di SMA Negeri 1 Bululawang.

Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama Cabang Dinas Pendidikan Malang dan diikuti sebanyak 1.244 siswa penerima manfaat. Bantuan ini merupakan bagian dari program beasiswa bagi siswa prasejahtera dan penyandang disabilitas yang ditetapkan melalui Perubahan APBD (PAPBD) Jawa Timur Tahun 2025. Puguh menjelaskan, program beasiswa ini adalah bentuk nyata keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Jatim dalam memberikan intervensi strategis di sektor pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah fondasi utama dalam melahirkan generasi unggul, berkualitas, dan berdaya saing. "Program ini bukan sekadar bantuan biaya pendidikan, tetapi investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Dari pendidikan yang baik akan lahir generasi yang kuat, dan dari generasi yang kuat akan terbangun kedaulatan bangsa," ujar Puguh. Ia menyebutkan, pada PAPBD 2025 terdapat 48.373 siswa di seluruh Jawa Timur yang menerima beasiswa, dengan 1.851 siswa di antaranya berasal dari Kabupaten Malang. Angka tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan akses pendidikan tetap terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai putra daerah yang lahir dan besar di Malang, Puguh menegaskan pentingnya mengawal langsung program-program strategis yang menyentuh kebutuhan dasar warga. Ia mengaku bersyukur dapat menyaksikan langsung proses pencairan beasiswa kepada para siswa penerima manfaat. "Saya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal program ini agar benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Malang," tegasnya. Lebih lanjut, Puguh menyoroti posisi Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadikan penguatan sumber daya manusia sebagai isu fundamental dalam pembangunan daerah maupun nasional.

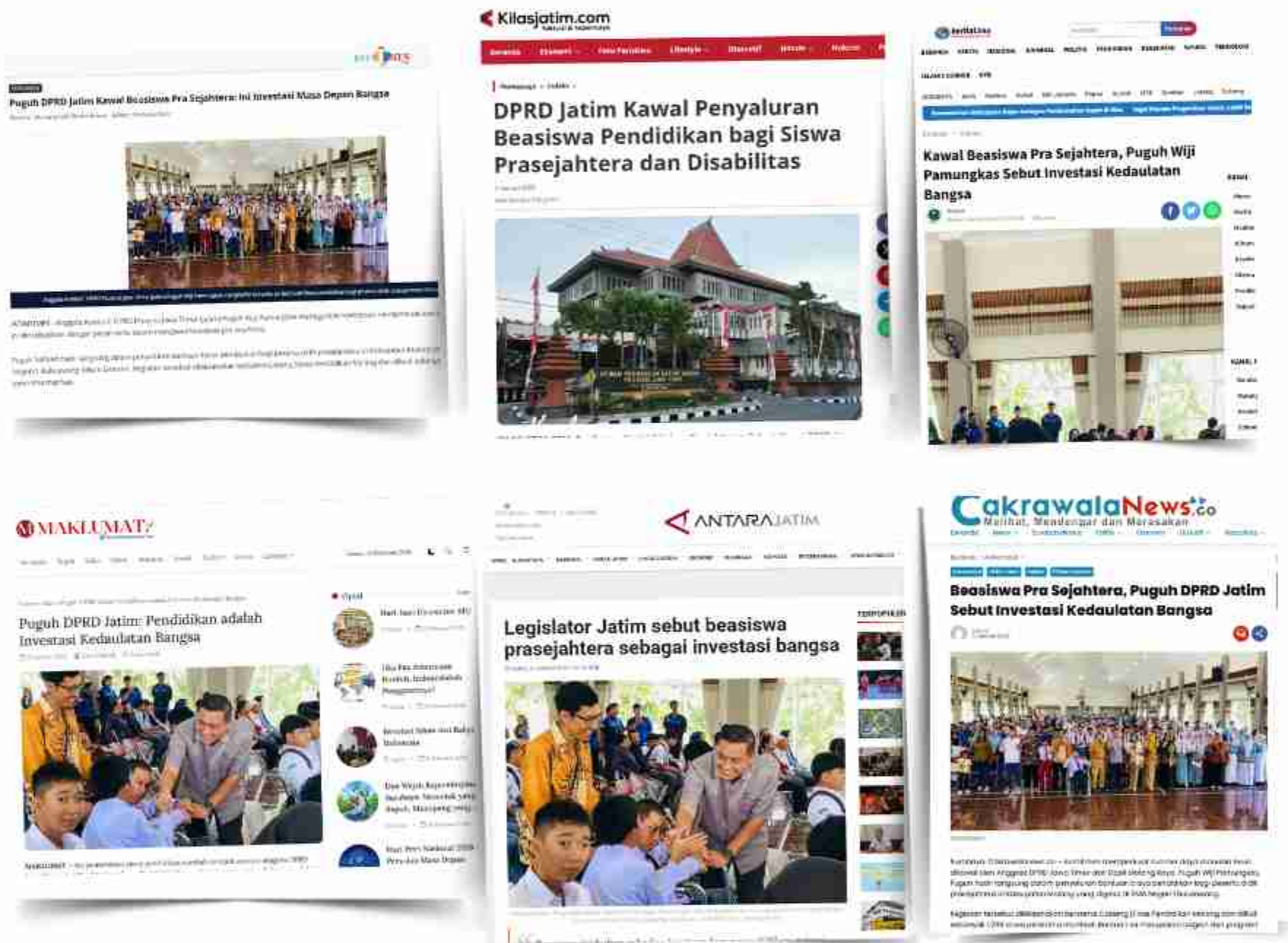
"Semakin baik penyelenggaraan pendidikan, semakin berkualitas generasi anak bangsa. Dan ketika kualitas generasi meningkat, maka eksistensi serta kedaulatan bangsa akan semakin kokoh," pungkasnya. Melalui program beasiswa ini, Puguh berharap tidak ada lagi anak-anak Jawa Timur yang terhambat mengenyam pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi, sekaligus memastikan bahwa pembangunan SDM menjadi prioritas utama dalam arah kebijakan daerah.



Kawal Beasiswa untuk Ribuan Siswa, Puguh DPRD Jatim Sebut Investasi Kedaulatan Bangsa



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)



ANGKA PERNIKAHAN TURUN, PUGUH WIJI PAMUNGKAS INGATKAN ANCAMAN SERIUS BAGI DEMOGRAFI JAWA TIMUR



Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyoroti fenomena menurunnya angka pernikahan di Indonesia, termasuk di Jawa Timur, yang dinilainya sebagai persoalan serius dan patut menjadi perhatian bersama. Puguh mengungkapkan bahwa dalam satu dekade terakhir, angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan signifikan hingga sekitar 30 persen. Kondisi ini dinilainya paradoksal jika dibandingkan dengan situasi demografi Indonesia saat ini yang tengah memasuki era bonus demografi.

"Fenomena pernikahan yang semakin turun ini terjadi paling tidak dalam satu dekade terakhir, dengan penurunan sekitar 30 persen. Ini menjadi kondisi yang paradoksal, karena Indonesia, termasuk Jawa Timur, sedang berada di era bonus demografi," ujar Puguh. Menurutnya, saat ini struktur penduduk Indonesia justru didominasi oleh generasi usia produktif, yakni generasi milenial dan Gen Z, yang secara usia berada pada fase ideal untuk menikah. Secara logika, dominasi usia produktif tersebut seharusnya berbanding lurus dengan meningkatnya angka pernikahan. "Usia-usia pernikahan sekarang sedang berada di puncaknya, didominasi oleh Gen Z dan milenial. Logikanya, karena jumlahnya besar, angka pernikahan juga seharusnya meningkat," jelas legislator PKS itu.

Namun realitas di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya. Puguh mencontohkan, penurunan angka pernikahan terlihat jelas di sejumlah kota besar di Jawa Timur, seperti Surabaya, Batu, Malang, dan beberapa daerah lainnya. Ia menilai, fenomena ini tidak lepas dari adanya perubahan persepsi generasi muda terhadap makna pernikahan. Jika sebelumnya pernikahan dipandang sebagai sebuah ritual sakral dalam kehidupan, kini pandangan tersebut mulai bergeser. "Gen Z mengalami perubahan persepsi terhadap pernikahan. Pernikahan sudah tidak lagi dianggap sebagai ritualitas yang sakral. Ada banyak alasan yang melatarbelakangi, mulai dari persoalan ekonomi, jaminan masa depan, hingga ketidaksiapan mental," paparnya.

Puguh menegaskan, tren penurunan angka pernikahan ini harus dibaca sebagai alarm serius bagi keberlangsungan demografi di Jawa Timur maupun Indonesia secara umum. Jika dibiarkan tanpa langkah antisipatif, kondisi ini berpotensi menimbulkan ancaman besar terhadap struktur demografi di masa depan. "Salah satu ancamannya adalah terjadinya aging population, yaitu kondisi di mana jumlah penduduk lanjut usia lebih besar dibandingkan jumlah usia muda dan produktif," terangnya.





Ia mencontohkan fenomena yang terjadi di Jepang, di mana rendahnya angka pernikahan dan kelahiran menyebabkan minimnya generasi penerus. Akibatnya, beban penduduk usia produktif untuk menopang kelompok usia lanjut menjadi sangat besar. "Kalau generasi muda tidak menikah dan tidak ada proses regenerasi, sementara perjalanan kehidupan terus berjalan, maka Gen Z dan milenial akan menua. Akhirnya yang terjadi adalah aging population, lebih banyak kelompok usia senja dibandingkan usia produktif," ujarnya.

Menurut Puguh, kondisi tersebut bukan hanya ancaman demografi, tetapi juga berpotensi menjadi persoalan serius bagi keberlangsungan demokrasi dan pembangunan bangsa. Sebab, sumber daya manusia merupakan elemen kunci dalam menopang kekayaan alam, industri, dan sistem sosial sebuah negara. Sebesar apa pun sumber daya alam dan industri yang kita miliki, tanpa sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas, negara tidak akan bisa berjalan dengan baik," tegasnya.

Karena itu, Puguh mendorong pemerintah untuk menjadikan isu penurunan angka pernikahan sebagai perhatian serius, dengan menyusun langkah-langkah mitigasi yang komprehensif dan melibatkan berbagai instrumen negara serta elemen masyarakat. "Ini harus menjadi isu yang terus dikampanyekan di tengah masyarakat, agar tumbuh kewaspadaan dan kesadaran bersama bahwa penurunan jumlah penduduk dan ancaman aging population adalah persoalan nyata yang perlu diantisipasi sejak sekarang," pungkasnya.



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)





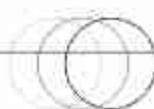
Migas Madura Dinilai Bisa Dongkrak Ekonomi Warga, Harisandi DPRD Jatim Dorong Bagi Hasil Lebih Adil

Potensi minyak dan gas bumi (migas) di wilayah Madura dinilai masih sangat besar dan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat lokal apabila dikelola dengan skema yang adil dan berpihak pada daerah. Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari, yang menyoroti pentingnya optimalisasi sistem bagi hasil dan partisipasi daerah dalam pengelolaan migas. Menurut Harisandi, kekayaan migas di Madura seharusnya tidak hanya menjadi sumber keuntungan bagi pemerintah pusat atau korporasi semata, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Salah satu kuncinya adalah memperkuat porsi bagi hasil yang diterima daerah.

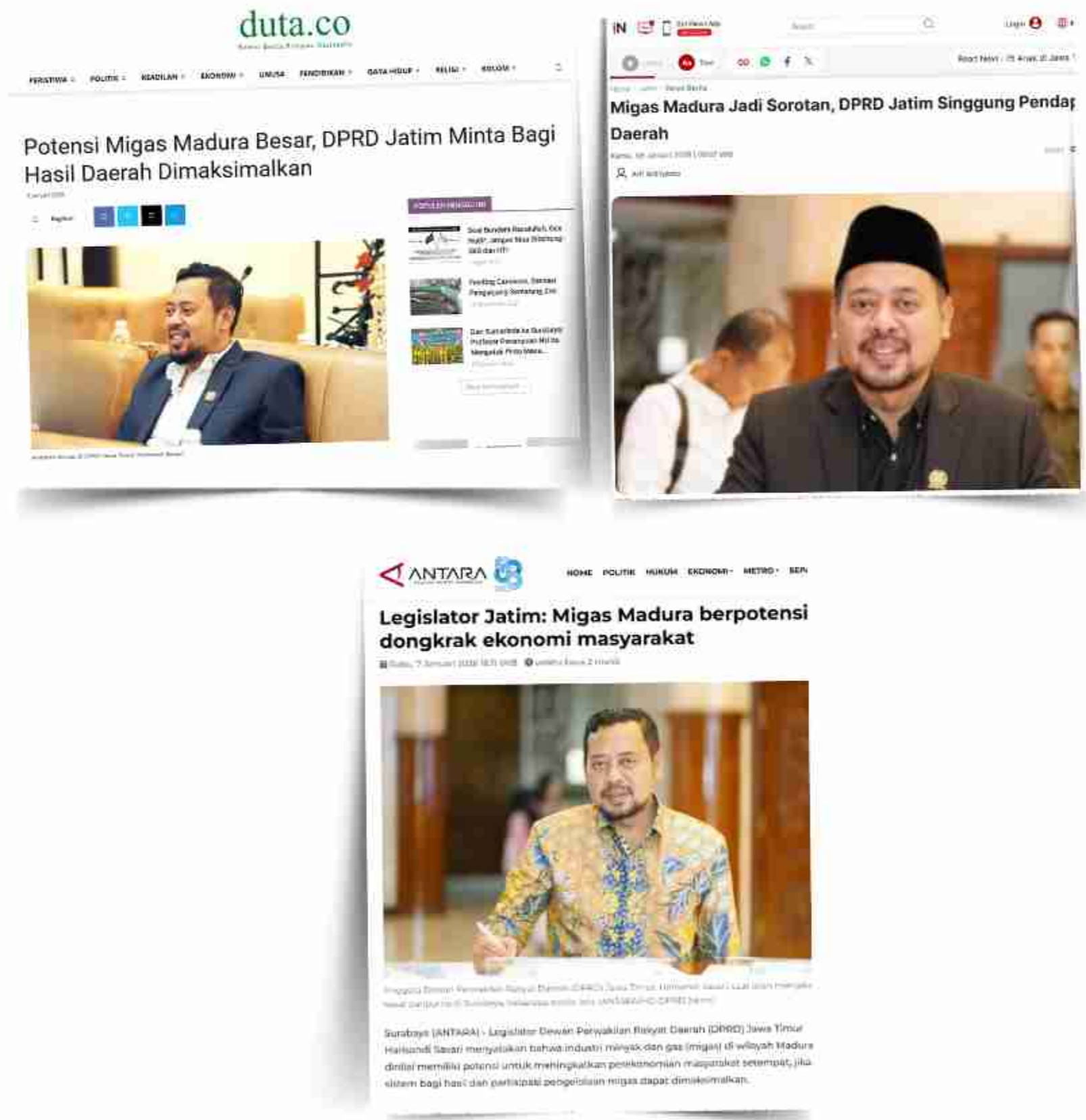
Kami melihat migas sebagai potensi besar untuk mengangkat ekonomi lokal, terutama jika bagi hasil dan partisipasi pengelolaan migas benar-benar dimaksimalkan,” ujar Harisandi. Anggota Komisi D DPRD Jatim ini menjelaskan, keterlibatan daerah melalui skema Participating Interest (PI) yang saat ini berada di kisaran 9–10 persen di sejumlah wilayah, perlu dioptimalkan agar memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Dengan meningkatnya PI, pemerintah kabupaten maupun provinsi berpeluang memperoleh tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jika PAD meningkat, maka ruang fiskal daerah juga semakin luas. Ini bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat,” jelas legislator PKS tersebut. Harisandi menegaskan, DPRD Jawa Timur terus mendorong agar industri migas benar-benar menjadi pengungkit kesejahteraan masyarakat Madura. Ia menilai, selama ini masih ada persepsi bahwa Madura hanya menjadi wilayah eksplorasi, sementara manfaat ekonominya justru lebih banyak mengalir ke luar daerah.

“Kami ingin menghapus pandangan negatif itu. Madura tidak boleh hanya menjadi penonton. Hasil migas harus kembali ke rakyat, baik melalui pembangunan fasilitas publik maupun peningkatan kualitas layanan masyarakat,” tegasnya. Ke depan, Harisandi berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan industri migas, agar potensi energi di Madura benar-benar menjadi berkah bagi masyarakat lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Jawa Timur.



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)



Lokasi sumur bor milik warga di Kabupaten Bangkalan yang mengeluarkan cairan diduga minyak kini telah diamankan oleh pihak berwenang. Meski demikian, DPRD Jawa Timur menegaskan bahwa pengamanan saja tidak cukup tanpa keterbukaan informasi kepada masyarakat. Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Raden Harisandi Savari, menilai langkah pengamanan lokasi sudah tepat sebagai upaya awal melindungi keselamatan warga dan mencegah dampak lingkungan yang lebih luas. Namun ia menekankan, tahapan berikutnya yang tak kalah penting adalah mengungkap hasil kajian secara transparan.

"Pengamanan lokasi sudah dilakukan dan itu patut diapresiasi. Tapi yang paling ditunggu masyarakat sekarang adalah kejelasan. Hasil uji laboratorium dari ESDM harus segera disampaikan secara terbuka agar tidak memunculkan spekulasi," ujar Harisandi, Minggu (18/1/2026). Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk meredam keresahan warga, sekaligus mencegah berkembangnya anggapan keliru bahwa cairan tersebut merupakan ladang minyak yang bisa dimanfaatkan secara bebas. "Fenomena ini tidak boleh disimpulkan sepihak. Harus menunggu kajian ilmiah. Negara wajib hadir memberi penjelasan yang jujur dan mudah dipahami masyarakat," tegas legislator PKS tersebut.

Harisandi juga menegaskan bahwa Komisi D DPRD Jatim akan terus mengawal penanganan kasus ini, termasuk rencana turun langsung ke lapangan untuk memastikan prosedur pengamanan, pengujian, dan komunikasi publik berjalan dengan baik. Ia kembali mengingatkan agar pendekatan kepada warga dilakukan secara persuasif dan edukatif. Pasalnya, pengeboran awal dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, bukan untuk tujuan eksploitasi migas. "Warga tidak boleh menjadi korban, apalagi dikriminalisasi. Mereka justru harus dilindungi dan diberikan pemahaman yang benar," katanya.

Diketahui, sumur bor warga di Bangkalan sebelumnya mengeluarkan cairan berwarna gelap dan berbau menyengat yang diduga minyak, sehingga sempat menarik perhatian warga dan viral di media sosial. Saat ini, area sumur telah dipasang pembatas dan ditutup sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan resmi dari Dinas ESDM Jawa Timur.



**LOKASI SUMUR
BERISI CAIRAN DIDUGA
MINYAK DI BANGKALAN
SUDAH DIAMANKAN,
HARISANDI DPRD JATIM
DESAK HASIL UJI
DIUNGKAP TERBUKA**



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)



**Pidana Kerja Sosial Jangan Dipolitisasi,****Agus Cah Minta Pengadilan Tegakkan Keadilan**

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono, mengingatkan agar penerapan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana ringan tidak diseret ke ranah politisasi. Ia menegaskan, kunci utama dari kebijakan baru ini adalah ketegasan pengadilan dalam menjaga keadilan dan kepercayaan publik. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Trenggalek itu menyampaikan bahwa pengadilan harus memiliki batasan yang jelas terkait kategori pidana ringan yang dapat dijatuhi hukuman kerja sosial. Menurutnya, tidak semua tindak pidana ringan bisa serta-merta diselesaikan dengan skema tersebut. "Perlu ketegasan dari pengadilan terkait kategori pidana ringan itu. Jangan sampai penerapannya justru membuka ruang politisasi," ujar Agus.

Agus menekankan, substansi terpenting dalam pelaksanaan pidana kerja sosial adalah tegaknya rasa keadilan di masyarakat. Karena itu, jenis kejahatan dan batasannya harus dirumuskan dan diterapkan secara jelas agar tidak menimbulkan multitafsir. Ia juga menyinggung soal kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan yang saat ini dinilai belum sepenuhnya kuat. Jika tidak dikelola dengan baik, kebijakan pidana kerja sosial justru dikhawatirkan menambah keraguan masyarakat. "Jangan sampai kerja sosial ini dipolitisasi dengan adanya intervensi di pengadilan. Bisa saja nanti kasus yang seharusnya dipenjara justru diubah sanksinya menjadi kerja sosial. Ini yang harus dibenahi terlebih dulu agar publik percaya," tegasnya.

Sebagai informasi, pidana kerja sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan ini menjadi salah satu terobosan dalam perubahan paradigma pemidanaan di Indonesia, yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pemenjaraan. Dalam KUHP baru tersebut, pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Pasal 85 mengatur bahwa pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah lima tahun, dan oleh hakim dijatuhi pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II sebesar Rp10 juta. Agus berharap, semangat pembaruan hukum pidana ini benar-benar dijalankan untuk menghadirkan keadilan yang berimbang, bukan justru membuka celah baru bagi praktik ketidakadilan dalam sistem hukum.



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)

Kawal Beasiswa untuk Ribuan Siswa, Puguh DPRD Jatim Sebut Investasi Kedaulatan Bangsa





DPRD JATIM GODOK RAPERDA OBAT BAHAN ALAM, AGUS CAH: HARUS DIKAWAL DARI HULU KE HILIR

DPRD Jawa Timur mulai menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan obat berbahan alam. Raperda ini dipersiapkan sebagai terobosan regulasi agar pengembangan obat bahan alam di Jawa Timur memiliki payung hukum yang komprehensif dan aplikatif, mulai dari hulu hingga hilir.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono, mengatakan pembahasan raperda tersebut diarahkan untuk mengampu seluruh rantai proses obat bahan alam, dari tahap budidaya bahan baku hingga pemanfaatannya oleh masyarakat. "Raperda obat bahan alam ini harus dikawal dari hulu sampai hilir. Mulai dari budidaya bahan bakunya, pengolahan, hingga produk akhirnya benar-benar berkualitas dan aman," ujar Agus dalam kunjungan dan rapat kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jatim. Menurut Agus, pada tahap hulu pemerintah provinsi perlu hadir melalui berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Dinas pertanian, perkebunan, hingga perikanan dan kelautan diharapkan memberi rekomendasi lahan yang sesuai, waktu tanam, serta masa panen agar bahan obat berbasis alam menghasilkan kualitas optimal. Ia mencontohkan, bahan obat alam tidak hanya berasal dari tanaman, tetapi juga dari hasil laut. "Seperti cangkang kepiting yang ternyata bisa menjadi bahan baku obat. Ini juga masuk kategori obat bahan alam yang harus dilindungi dan diatur," jelas legislator PKS itu.

Pada tahap berikutnya, raperda ini juga akan menjadi pijakan pengawasan proses produksi. Agus menekankan pentingnya menjaga kemurnian obat bahan alam agar tidak dicampur dengan bahan kimia, sehingga keamanan dan khasiatnya tetap terjaga. Selain itu, DPRD Jatim juga mendorong agar raperda ini memudahkan perizinan serta pendampingan bagi pelaku UMKM. Terutama UMKM yang mengembangkan produk minuman kesehatan dan obat berbasis bahan alam yang saat ini kembali diminati masyarakat. "Kami ingin raperda ini mempermudah UMKM, bukan mempersulit. Justru memberi pendampingan agar produk mereka berstandar dan memiliki daya saing," tegasnya. Lebih jauh, Agus berharap obat bahan alam ke depan tidak hanya beredar bebas di masyarakat, tetapi juga bisa menjadi rujukan pengobatan formal. "Harapan kami, obat bahan alam ini bisa memenuhi standar kesehatan, bahkan dapat diresepkan oleh dokter dan digunakan di rumah sakit," ujarnya.

Saat ini, pembahasan raperda masih berada pada tahap awal berupa brainstorming dan pengumpulan data dari OPD terkait. Hadir dalam rapat tersebut antara lain Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan Perindustrian, Dinas Kesehatan, serta Balai POM.

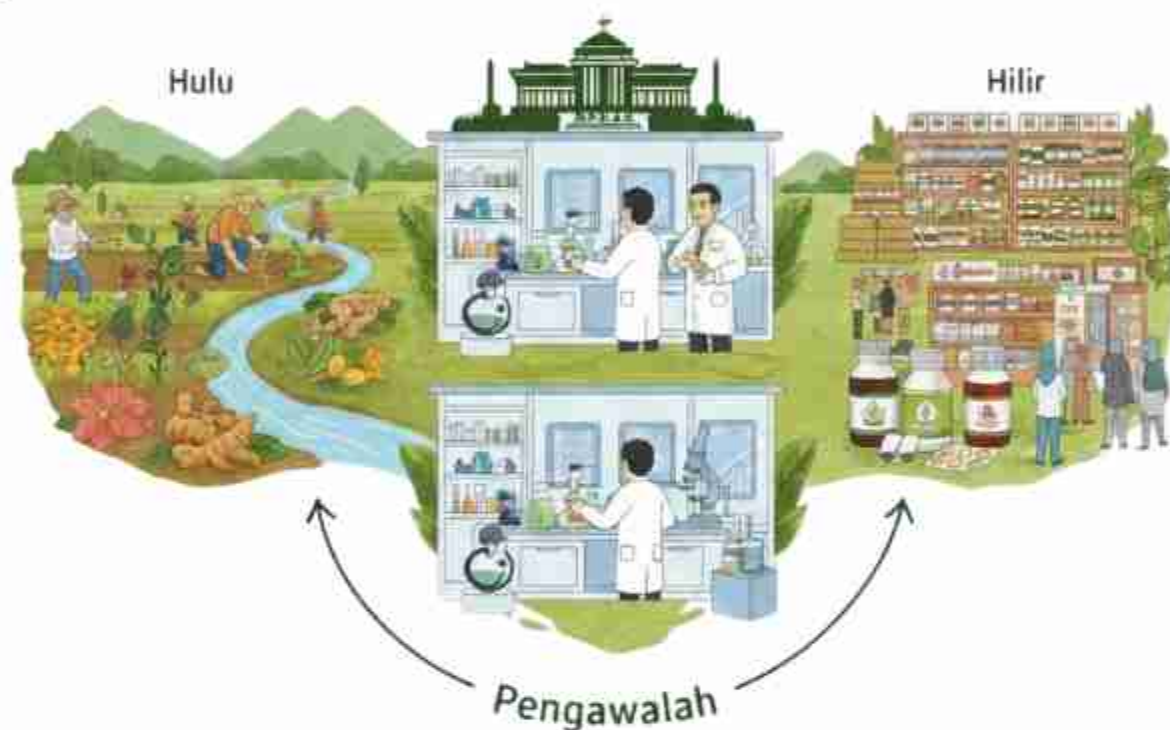
Agus menambahkan, DPRD Jatim juga membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan raperda ini. Komunitas pengobatan tradisional dan pegiat obat berbahan alam diharapkan dapat memberikan masukan agar regulasi yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jawa Timur.

"Harapan kami, perda ini nantinya berdampak nyata, aplikatif, dan membawa manfaat besar bagi kesehatan sekaligus perekonomian masyarakat Jawa Timur," pungkasnya.



Menurut Agus, pada tahap hulu pemerintah provinsi perlu hadir melalui berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Dinas pertanian, perkebunan, hingga perikanan dan kelautan diharapkan memberi rekomendasi lahan yang sesuai, waktu tanam, serta masa panen agar bahan obat berbasis alam menghasilkan kualitas optimal. Ia mencontohkan, bahan obat alam tidak hanya berasal dari tanaman, tetapi juga dari hasil laut. "Seperti cangkang kepiting yang ternyata bisa menjadi bahan baku obat. Ini juga masuk kategori obat bahan alam yang harus dilindungi dan diatur," jelas legislator PKS itu.

Pada tahap berikutnya, raperda ini juga akan menjadi pijakan pengawasan proses produksi. Agus menekankan pentingnya menjaga kemurnian obat bahan alam agar tidak dicampur dengan bahan kimia, sehingga keamanan dan khasiatnya tetap terjaga. Selain itu, DPRD Jatim juga mendorong agar raperda ini memudahkan perizinan serta pendampingan bagi pelaku UMKM. Terutama UMKM yang mengembangkan produk minuman kesehatan dan obat berbasis bahan alam yang saat ini kembali diminati masyarakat.



"Kami ingin raperda ini mempermudah UMKM, bukan mempersulit. Justru memberi pendampingan agar produk mereka berstandar dan memiliki daya saing," tegasnya. Lebih jauh, Agus berharap obat bahan alam ke depan tidak hanya beredar bebas di masyarakat, tetapi juga bisa menjadi rujukan pengobatan formal. "Harapan kami, obat bahan alam ini bisa memenuhi standar kesehatan, bahkan dapat diresepkan oleh dokter dan digunakan di rumah sakit," ujarnya.

Saat ini, pembahasan raperda masih berada pada tahap awal berupa brainstorming dan pengumpulan data dari OPD terkait. Hadir dalam rapat tersebut antara lain Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan Perindustrian, Dinas Kesehatan, serta Balai POM. Agus menambahkan, DPRD Jatim juga membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan raperda ini. Komunitas pengobatan tradisional dan pegiat obat berbahan alam diharapkan dapat memberikan masukan agar regulasi yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jawa Timur. "Harapan kami, perda ini nantinya berdampak nyata, aplikatif, dan membawa manfaat besar bagi kesehatan sekaligus perekonomian masyarakat Jawa Timur," pungkasnya.

Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)

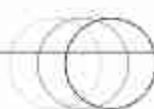


TRAUMA PMK MASIH MEMBEKAS, KHUSNUL DPRD JATIM SEBUT PETERNAK BUTUH PENDAMPINGAN SERIUS



Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Muhammad Khusnul Khuluk, menilai trauma wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) masih membekas kuat di kalangan peternak kambing dan domba di Jawa Timur. Kondisi ini membuat banyak peternak belum sepenuhnya pulih dan membutuhkan pendampingan serius dari pemerintah agar sektor peternakan rakyat kembali bangkit. Khusnul mengungkapkan, wabah PMK yang melanda pada 2022 lalu menjadi pukulan telak bagi peternak, khususnya pemelihara hewan berkaki empat. Saat itu, angka kematian ternak tinggi, harga jual anjlok, dan ketakutan masyarakat terhadap penularan penyakit membuat aktivitas peternakan nyaris terhenti.

"PMK itu dampaknya luar biasa. Banyak ternak mati, harga jatuh, dan peternak benar-benar terpukul. Bahkan saya sendiri merasakannya, membeli kambing jauh hari sebelum Iduladha, tapi saat hari H tidak laku karena orang takut," ujar Khusnul. Menurutnya, meski saat ini situasi sudah relatif membaik, sejumlah penyakit ternak lain masih kerap muncul dan menambah kekhawatiran peternak. Penyakit yang dikenal masyarakat sebagai lato-lato, misalnya, menyebabkan ternak sulit gemuk meski sudah diberi pakan dan vitamin, sehingga berujung pada kerugian.



“Trauma itu masih ada. Begitu ada isu penyakit, peternak langsung waswas. Ini yang membuat sebagian masyarakat ragu untuk kembali beternak secara optimal,” jelas legislator PKS tersebut. Khusnul menegaskan, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia mendorong pemerintah daerah untuk hadir lebih serius melalui pendampingan berkelanjutan, terutama dalam aspek kesehatan hewan, penyuluhan, dan manajemen peternakan rakyat.

“Peternak kita ini mayoritas masih skala rumahan. Mereka butuh kehadiran penyuluh yang rutin turun ke lapangan, memberi edukasi soal pencegahan penyakit, pakan yang baik, hingga cara beternak yang lebih berkelanjutan,” tegasnya. Selain pendampingan, Khusnul juga menyoroti pentingnya kualitas bantuan ternak dari pemerintah. Ia menilai, kegagalan sejumlah program bantuan selama ini disebabkan bibit ternak yang tidak unggul dan tidak sesuai dengan kondisi lokal.

“Kalau bibitnya tidak bagus, dikasih pakan apa pun tidak akan optimal. Ini harus dibenahi. Jawa Timur punya kambing Senduro dan domba Sapudi yang unggul, seharusnya itu yang dikembangkan,” katanya.

Dengan pendampingan yang serius dan kebijakan yang tepat sasaran, Khusnul optimistis sektor peternakan kambing dan domba dapat kembali menjadi penopang ekonomi masyarakat desa sekaligus berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan Jawa Timur. “Peternakan ini prospeknya masih sangat baik. Tapi kuncinya ada pada pendampingan, bukan sekadar bantuan. Kalau ini berjalan, kesejahteraan peternak pasti meningkat,” pungkasnya.



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)



Peringatan Hari Desa Nasional di Desa Ranuwurung, Kabupaten Lumajang yang digelar PKS, Ahad (18/1/2026), menjadi momentum penegasan politik nilai dan komitmen. Anggota DPRD Jawa Timur Khusnul Khuluk mengungkapkan bahwa kepercayaan masyarakat desa kepadanya sejak awal dibangun tanpa praktik politik uang, melainkan melalui janji kerja yang dibuktikan dengan pembangunan nyata. Dalam sambutannya sebagai Ketua Panitia kegiatan, Khusnul menceritakan bahwa dukungan awal masyarakat Ranuwurung pada Pemilu 2014 diperolehnya tanpa amplop, hanya berbekal komitmen memperjuangkan kebutuhan dasar desa.

"Saya pertama kali mendapatkan suara di Desa Ranuwurung tahun 2014, hanya di satu dusun, sekitar 450 suara di dua TPS, tanpa amplop. Perjanjiannya sederhana, kalau terpilih jalan desa harus dibangun," ujar Khusnul. Komitmen tersebut, lanjutnya, langsung direalisasikan setelah ia terpilih. Pembangunan jalan desa dilakukan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya dan terus berlanjut hingga kini, seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat.

"Alhamdulillah, jalan dibangun tahun 2015 satu kilometer, lalu berlanjut di tahun berikutnya. Kepercayaan masyarakat itu dibalas dengan kerja nyata," kata legislator PKS itu. Kepercayaan warga Ranuwurung terhadap Khusnul terus menguat. Pada Pemilu 2024, desa tersebut bahkan memberikan dukungan penuh kepada PKS hingga meraih suara seratus persen di tingkat provinsi. "Ini bukan soal angka, tapi soal hubungan. Kalau wakil rakyat dan masyarakat saling memegang komitmen, maka politik bisa berjalan sehat," tegasnya.

Menurut Khusnul, Desa Ranuwurung menjadi contoh bahwa politik tanpa amplop bukan hanya mungkin, tetapi juga berkelanjutan jika diiringi konsistensi dan keberpihakan nyata kepada rakyat. Ia berharap kisah Ranuwurung dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain, sekaligus menjadi pengingat bahwa politik desa yang beradab akan melahirkan pembangunan yang berkeadilan. "Desa tidak butuh janji besar, desa butuh bukti. Dan politik tanpa amplop adalah jalan membangun kepercayaan itu," pungkasnya.

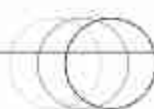


**TERPILIH TANPA
AMPLOP, KHUSNUL
KHULUK TEGASKAN
POLITIK KOMITMEN DI
HARI DESA NASIONAL**

"Alhamdulillah, jalan dibangun tahun 2015 satu kilometer, lalu berlanjut di tahun berikutnya. Kepercayaan masyarakat itu dibalas dengan kerja nyata," kata legislator PKS itu.

Kepercayaan warga Ranuwurung terhadap Khusnul terus menguat. Pada Pemilu 2024, desa tersebut bahkan memberikan dukungan penuh kepada PKS hingga meraih suara seratus persen di tingkat provinsi. "Ini bukan soal angka, tapi soal hubungan. Kalau wakil rakyat dan masyarakat saling memegang komitmen, maka politik bisa berjalan sehat," tegasnya.

Menurut Khusnul, Desa Ranuwurung menjadi contoh bahwa politik tanpa amplop bukan hanya mungkin, tetapi juga berkelanjutan jika diiringi konsistensi dan keberpihakan nyata kepada rakyat. Ia berharap kisah Ranuwurung dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain, sekaligus menjadi pengingat bahwa politik desa yang beradab akan melahirkan pembangunan yang berkeadilan. "Desa tidak butuh janji besar, desa butuh bukti. Dan politik tanpa amplop adalah jalan membangun kepercayaan itu," pungkasnya.



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)

BATIMTIMES

Peringatan Hari Desa Nasional, Khusnul Khuluk Kenang Raih Kursi DPRD Jatim Tanpa Amplop

Penulis : Muhammad Choirul Anwar - Editor : Sri Kurnia Mahiruni

18-1



Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Khusnul Khuluk

ATIMTIMES - Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Khusnul Khuluk mengenang perjalanannya meraih kursi legislatif tanpa menggunakan amplop. Hal ini disampaikan di sela-sela kegiatan peringatan Hari Desa Nasional di Desa Ranuwurung, Kabupaten Lumajang, Minggu (18/1/2

ada acara yang digelar oleh PKS itu, Khusnul Khuluk menekankan bahwa peringatan Hari Desa Nasional menjadi momentum penegasan p

tan komitmen. Ia mengungkapkan bahwa kepercayaan masyarakat desa kepadanya sejak awal dibangun tanpa praktik politik uang, melaink

anji kerja yang dibuktikan dengan pembangunan nyata.





Galeri Foto Kegiatan



HUT PKK
11 Januari 2026



Peresmian Lapangan Futsal
Hibah 2025. (21 Januari 2026)

SMP 11 Maret Surabaya (Jl. Banjar
Sugihan 11/01, Tandes)

Kunjungan tamu dari SD Al-Uswah 2
Rungkut (22 Januari 2026)

Ruang Fraksi PKS DPRD Provinsi Jatim
Tamu 6 orang





Galeri Foto Kegiatan



Kunjungan tamu dari Kelompok masyarakat eks. penyedia permakanaan dinsos Surabaya, Komunitas UMKM Bersatu Jatim, dan Majelis Taklim Mar'atus Sholichah. (22 Januari 2026)

Ruang Fraksi PKS DPRD Provinsi Jatim
Tamu 11 orang



Senam Tambak Mayor
25 Januari 2026

1. RT10 RW07 Tambak Mayor III
No. 56 Kec. Asemrowo

Penyerahan laptop program Prov
Silaturahmi pengajian

SMP IT Utsman bin Affan (Jl. Lakarsantri
No. 29-35, Lakarsantri, Kec. Lakarsantri,
Surabaya) Rungkut Kidul
Peserta 80-100 orang





Galeri Foto Kegiatan



Membahas kepemimpinan otentik (authentic leadership) yang berorientasi pada keberlanjutan, pertumbuhan bisnis, dan dampak positif bagi masyarakat serta bangsa.

Camp King Sulaiman, Malang
6 Januari 2026



Kegiatan ini menegaskan bahwa pencapaian visi membutuhkan energi, sementara pelaksanaan misi menuntut dedikasi, ketangguhan, dan konsistensi dalam proses yang berkelanjutan. Nilai tersebut tercermin dari berbagai kisah ketangguhan dunia, baik dalam bidang olahraga maupun sejarah peradaban, yang menunjukkan bahwa capaian besar lahir melalui perjalanan panjang.

Camp King Sulaiman, Malang
8 Januari 2026



Galeri Foto Kegiatan



Berdiskusi meneguhkan semangat dan komitmen untuk melakukan pelayanan publik di Kota Malang.

Kota Malang
11 Januari 2026
Tamu Fraksi PKS Kota Malang



Dalam dialog JTV agenda JATIM GASPOL, dibahas model pemilihan kepala daerah dalam perspektif konstitusi, merujuk Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang memberi ruang negara menentukan mekanisme Pilkada secara demokratis, baik melalui pemilihan langsung maupun DPRD, sesuai kebutuhan nasional saat ini.

JTV Surabaya
14 Januari 2026



Menyampaikan ulang tentang esensi pelayanan, yakni menyeimbangkan antara "Mutu Klinis dan Mutu Service" dalam upaya untuk memenuhi harapan pasien.

RSU Wajak Husada
30 Januari 2026
Peserta Staff RSU



Jadi Pemateri Seminar Nasional IMABA (Ikatan Mahasiswa Bata-bata) Membangun mental mahasiswa santri untuk ikut serta dalam reposisi politik dan intelektual

Hotel Odaita Pamekasan
25 Januari 2026
Peserta 250 orang



Konstituen paham dengan tugas anggota dewan dan lebih dekat dengan anggota dewan

Tugu, Trenggalek
25 Januari 2026



Peringatan hari Ibu dan Difable

Joyokarto, Tempeh, Lumajang
23 Januari 2026
Peserta 90 orang



**Peresmian SPAM PDAM Kali Sono
Desa Sumberwringin Kecamatan
Klakah Kab Lumajang**

Klakah, Lumajang
5 Januari 2026
Peserta 80 orang



**Peresmian jembatan Desa
Ranuwurung Kecamatan
Randuagung Kab Lumajang**

Ranuwurung, Randuagung, Lumajang
18 Januari 2026
Peserta 100 orang



**Advokasi salah satu Asosiasi
Kepala Desa**

Jakarta
20 Januari 2026
Peserta 25 orang



Senam KSN Sindoro

Joyokarto, Tempeh, Lumajang
23 Januari 2026
Peserta 40 orang



Tasyakuran bersama Poktan Sido Makmur dan Tani Sakti Desa Karangsemanding

Balung, Jember
23 Januari 2026
Peserta 15 orang



Rakerda DPD Lumajang

Lumajang
7 Januari 2026
Peserta 30 orang

FRAKSI PKS PROVINSI DPRD JAWA TIMUR



www.fraksipksjatim.id



[fraksipksjatim](https://www.facebook.com/fraksipksjatim)